



Strategi Penerapan Ekonomi Hijau dalam Mengatasi Middle Income Trap

Implementing the Green Economy: Avoiding the Middle Income Trap

Rismayanti

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Institut Agama Islam Negeri Palopo
email: rismayanti@iainPalopo.ac.id

Disubmit: 1 Februari 2023; Direvisi; 9 Maret 2023; Dipublish; 1 April 2023

Abstract

The purpose of this essay is to outline methods for implementing a green economy in Palopo City in order to escape the middle income trap. Since the creation of Palopo City in 2002, the per capita income of the residents of that city has fallen into the middle income range. The worst effect of this would be a lack of investor confidence in Palopo City, which could eventually lead to an increase in the poverty rate due to a lack of jobs. Therefore, Palopo City needs a plan to use the idea of a green economy to escape the middle class trap. The research design for this study is descriptive qualitative, and the methods for gathering data used are recording, interviews, and observation. The research results obtained are that currently the Palopo City government is building a city with the Business Traveler concept, but in this development, it is considered less than optimal, especially in the application of the green economy concept which has an impact on the accumulation of waste from business activities that pollutes the environment. Additionally, Palopo City's open unemployment rate is the second-highest in the country after Makassar City, necessitating increased job growth in the green economy industry. Strategies that can be applied in Palopo City to overcome the problem of the middle income trap by applying the green economy concept are: (1) waste management and circular economy, (2) application of extended producer responsibility policies as the role of producers who are ecologically literate, and (3) training programs green economy to prepare the human resources of Palopo City towards environmental-based economic development.

Keywords : *Green Economy; Middle Income Trap; Per Capita Income*

Abstrak

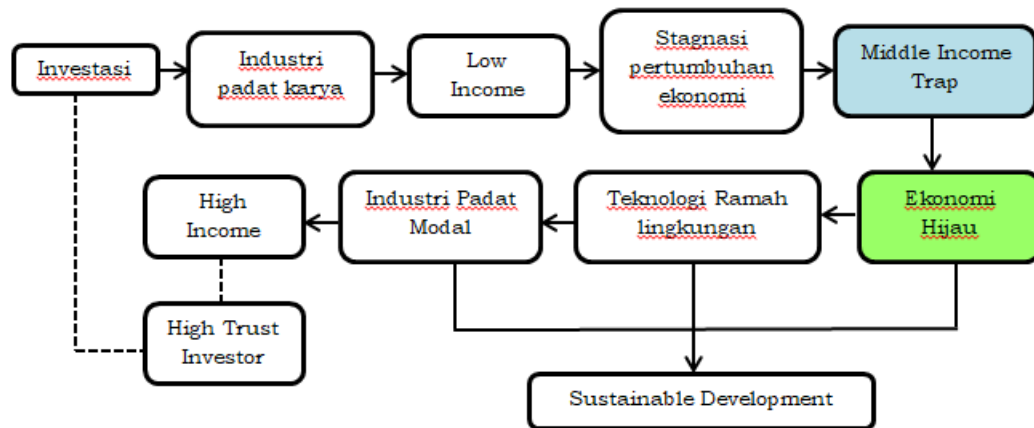
Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi penerapan ekonomi hijau dalam mengatasi middle income trap di Kota Palopo. Pendapatan perkapita masyarakat Kota Palopo masuk dalam kategori *middle income* dan ini telah berlangsung sejak berdirinya Kota Palopo tahun 2002. Jika hal ini terus dibiarkan maka dampak terburuk adalah kurangnya kepercayaan investor untuk berinvestasi di Kota Palopo yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka kemiskinan akibat kurangnya lapangan pekerjaan. sehingga butuh strategi agar Kota Palopo dapat keluar dari kondisi *middle income trap* dengan konsep ekonomi hijau. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh adalah saat ini pemerintah Kota Palopo sedang membangun Kota dengan konsep *Business Traveler* namun dalam pembangunan ini dinilai kurang maksimal terutama dalam penerapan konsep ekonomi hijau yang berdampak pada penumpukan limbah dari kegiatan bisnis yang mencemari lingkungan. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka Kota Palopo berada di posisi tertinggi kedua setelah Kota Makassar, hal ini memerlukan pembenahan dalam penciptaan lapangan kerja di sektor ekonomi hijau. Strategi yang dapat diterapkan di Kota Palopo untuk mengatasi masalah middle income trap dengan penerapan konsep ekonomi hijau adalah : (1) penanganan limbah dan ekonomi sirkular, (2) penerapan kebijakan *extended producer responsibility* sebagai peran produsen yang melek ekologi, dan (3) program pelatihan ekonomi hijau untuk mempersiapkan sumber daya manusia Kota Palopo menuju pembangunan ekonomi yang berbasis lingkungan.

Kata Kunci : Ekonomi Hijau; Middle Income Trap; Pendapatan Perkapita

1. PENDAHULUAN

Kota Palopo menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam *middle income trap* sejak terbentuk tahun 2002. Hal ini dapat dilihat dari dominasi industri padat karya dengan upah tenaga kerja yang tergolong rendah (Erani et al., n.d.), serta pertumbuhan sektor industri padat modal yang lambat. Hal ini diperkuat dengan data pendapatan perkapita kota palopo rata-rata berada pada kisaran Rp. 35.000.000 – Rp. 45.000.000 /tahun dan angka ini termasuk dalam kategori *lower middle income*. Negara berpenghasilan menengah tidak hanya mengalami kesulitan untuk bersaing dengan *low-wage countries* akibat dari kebijakan pengecualian, tapi juga kesulitan untuk bersaing dengan *high-technology countries* akibat dominasi industri padat karya (Setiawan, 2017). Dampaknya kepercayaan investor (*trust investment*) untuk menginvestasikan dananya menurun menyebabkan lambatnya

pertumbuhan sektor industri, sejalan dengan itu penyerapan tenaga kerja ikut melambat dan akhirnya banyak masyarakat yang menggangu sehingga kemiskinan akan meningkat. Hal ini juga terjadi di Kota Palopo, dimana pertumbuhan sektor industri padat modal maupun padat karya yang lambat dan berdampak pada pendapatan masyarakat. Diperlukan suatu strategi yang dapat menjadi suatu solusi integrative yang berbasis *sustainable development*. (Muhammad et al., 2022)



Gambar 1. *Middle Income to High Income Based Green Economy*

Pada gambar 1 dapat dilihat hubungan antara *middle income* dan *green economy* dalam meningkatkan pendapatan dari *low income* ke *high income*. Pemerintah Indonesia telah menetapkan ekonomi hijau sebagai salah satu strategi transformasi struktural ekonomi yang dinilai sebagai solusi dari sistem ekonomi eksploitatif yang selama ini cenderung merusak lingkungan. Menjadi 'hijau' dan berkelanjutan ternyata tidak hanya berdampak positif bagi lingkungan, tapi juga dapat meningkatkan profit suatu kegiatan investasi sehingga pendapatan perkapita pun dapat lebih tinggi di masyarakat. (Susanti & Wicaksono, n.d.)

Kota Palopo mengalami *middle income trap* yang telah berlangsung selama 21 Tahun. Hal tersebut berdampak pada rendahnya penyerapan tenaga kerja di Kota Palopo dimana angka pengangguran Kota Palopo termasuk yang tertinggi diantara seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yakni di angka 10.37% (*Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2021*, n.d.). Hal ini terjadi akibat dari rendahnya gairah investasi terutama pada sektor industry padat modal dan berimplikasi pada pendapatan masyarakat.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menerapkan konsep ekonomi hijau yang saat ini masih perlu dikembangkan di Kota Palopo. Pengembangan ekonomi hijau dapat menumbuhkan industri-industri berbasis teknologi yang dapat menyerap tenaga kerja seperti industri pengolahan sampah dan berbagai industri hijau lainnya. Namun, ekonomi hijau masih belum menjadi prioritas pembangunan Kota Palopo dalam mengatasi *middle income trap* yang saat ini tengah menjadi ancaman jangka panjang bagi Kota Palopo.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan metode atau pendekatan studi kasus. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Kota Palopo. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini merupakan perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, yakni berupa hasil wawancara. Sementara data sekunder terdiri dari literatur-literatur, jurnal-jurnal terkait, dan data-data yang tersaji oleh Badan Pusat Statistik Kota Palopo. Teknik pengumpulan data yakni dengan melakukan observasi, wawancara mendalam dan beberapa dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini seperti data rekapitulasi sampah, data pendapatan perkapita dll.

Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi dan penyajian data serta *concluding drawing*. Sebelum data dianalisis maka terlebih dahulu dilakukan uji keabsahan data dengan menggunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

1. Dampak Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan Dengan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Akibat Dari Middle Income Trap

Penelitian ini melibatkan 2 (dua) instansi pemerintah di Kota Palopo yakni Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Palopo serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo. Hal ini dilakukan untuk mengetahui arah pembangunan ekonomi Kota Palopo dan sejauh mana pembangunan itu mampu memberikan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan perkapita Kota Palopo.

Dari hasil wawancara, menurut bapak Iswan S.E.,M.Si, Kota Palopo akan dibangun menjadi Kota bisnis traveler yaitu Kota yang menopang Kota *leisure traveler* dalam hal ini Kota Toraja. Adapun beberapa hasil wawancara yang telah dilakukan dari beberapa informan tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat di Kota Palopo.

Dari hasil wawancara, menurut bapak Iswan S.E.,M.Si, selaku Sekretaris Bidang Ekonomi dan Sosial BAPPEDA Kota Palopo, Kota Palopo yang berdekatan dengan Kota Toraja menjadi suatu peluang bagi pengunjung yang ingin ke Toraja akan melewati Kota Palopo ini dimanfaatkan oleh Kota Palopo untuk membangun sarana prasarana yang dapat menunjang Kota Toraja dalam melayani pengunjungnya sehingga akan dibangun mulai dari tempat ole-ole tempat beristirahat

juga sarana pendidikan, kesehatan dll juga diharapkan Kota Palopo akan menjadi tujuan bisnis bagi masyarakat disekitar Kota Palopo.

Sementara, menurut bapak Hasfi S.Hut selaku Ketua Bidang Tata Ruang Kota Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, dilihat dari data perijinan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo yang paling banyak adalah SPPL atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup surat ini diperuntukkan untuk pembangunan usaha skala mikro kecil dan menengah.

a. Dampak Sosial

Dari hasil wawancara, menurut bapak Iswan, S.E., M.Si. selaku sekretaris Bidang Ekonomi dan Sosial BAPPEDA Kota Palopo, disamping pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah untuk menuju Kota dengan konsep *business traveler* juga perlu adanya peningkatan kualitas masyarakat dalam menyambut konsep tersebut sehingga pemerintah menyediakan program pelatihan untuk meningkatkan skill masyarakat contohnya pelatihan barista

b. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi adalah akibat yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan di Kota Palopo, dari hasil wawancara, menurut bapak Miswar selaku Ketua Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, dengan adanya pembangunan salah satunya Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi meski belum ada legalitas dari pemerintah terkait perijinan masyarakat untuk berjualan disana namun untuk saat ini banyak pedagang yang berjualan di sekitar Ruang Terbuka Hijau tersebut sehingga terjadi perputaran ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.

c. Dampak Lingkungan

Dari hasil wawancara, menurut bapak Miswar selaku Ketua Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, yang menjadi masalah selain ketertiban atau ketidakteraturan posisi pedagang di lapangan pancasila dan di ruang terbuka hijau lainnya juga ada masalah yang perlu perhatian khusus yaitu terkait kebersihan yang tidak diperhatikan oleh para pedagang, pedagang yang berjualan di area Ruang Terbuka Hijau tidak memperhatikan kebersihan lingkungan akibat kegiatan ekonomi yang mereka lakukan.

Sementara, menurut pak Hasfi S.Hut selaku Ketua Bidang Tata Ruang Kota Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi pencemaran lingkungan adalah dengan melaksanakan program bank sampah yang telah dilakukan selama 4 tahun terakhir selain meningkatkan kesadaran masyarakat juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat karena sampah yang di setor akan ditukar dengan uang atau pun emas program ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penjagaan lingkungan.

2. Strategi Mengatasi *Middle Income Trap* Melalui Penerapan Ekonomi Hijau

Middle Income Trap adalah masalah ekonomi negara yang mengalami stagnasi dan ini terjadi di Kota Palopo dapat dinilai dari pendapatan perkapita masyarakat wilayah tersebut pendapatan perkapita ini dapat dilihat dari dua indikator yaitu Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk wilayah tersebut sehingga perlu adanya keselarasan antara PDRB dan jumlah penduduk namun kenyataannya di Kota Palopo tidak terjadi sehingga menyebabkan Kota Palopo terjebak dalam *middle income trap* yang menjerumuskan Kota Palopo ke jurang kemiskinan.

Dengan penerapan ekonomi hijau diharapkan dapat melepaskan Kota Palopo dari masalah *middle income trap* karena dengan ekonomi hijau tidak hanya dapat menyelamatkan ekologi tapi juga dapat membangun lapangan kerja baru bahkan kata BAPPENAS dengan penerapan ekonomi hijau mampu membuka lapangan kerja baru 10 kali lipat lebih banyak dari pada investasi konvensional.

NO	TAHUN	BULAN	ASAL SAMPAH				KET.
			RUMAH TANGGA (Kg)	PASAR (Kg)	INDUSTRI (Kg)	MEDIS (Kg)	
1	2018	JANUARI	710.830	38.130	4.530	TOTAL	
		FEBRUARI	1.265.740	85.120	3.480		
		MARET	1.365.770	124.450	22.950		
		APRIL	1.311.350	93.310	8.200		
		MEI	1.456.470	138.350	4.890		
		JUNI	1.260.120	93.070	4.360		
		JULI	1.302.450	86.450	17.700		
		AGUSTUS	1.174.980	81.540	10.170		
		SEPTEMBER	1.169.790	88.400	4.240		
		OKTOBER	1.350.700	116.100	9.820		
			NOVEMBER	1.335.610	108.640	4.110	TOTAL
			DESEMBER	1.417.910	101.180	8.720	
JUMLAH			15.121.720	1.154.740	103.170	16.379.630	
2	2019	JANUARI	1.453.240	88.640	7.770	TOTAL	
		FEBRUARI	1.369.950	88.560	13.940		
		MARET	1.539.690	75.070	6.600		
		APRIL	1.455.740	71.140	10.260		
		MEI	1.439.590	95.070	8.710		
		JUNI	1.303.930	83.520	8.160		
		JULI	1.527.290	78.020	3.110		
		AGUSTUS	1.612.140	54.840	4.340		
		SEPTEMBER	1.433.320	87.440	1.530		
		OKTOBER	1.519.410	70.720	4.090		
		NOVEMBER	1.575.320	60.820	1.250		
		DESEMBER	1.450.170	86.350	3.870		
JUMLAH			17.679.790	940.190	73.630	18.693.610	
3	2020	JANUARI	1.365.570	76.760	4.780	TOTAL	
		FEBRUARI	1.533.670	67.780	3.650		
		MARET	1.657.570	75.890	4.790		
		APRIL	1.280.950	65.780	3.780		
		MEI	1.575.850	63.590	3.450		
		JUNI	1.710.340	65.950	4.550		
		JULI	1.655.484	62.150	3.350		
		AGUSTUS	1.580.380	55.750	4.870		
		SEPTEMBER	1.485.430	57.850	3.870		
		OKTOBER	1.575.540	65.355	4.850		
		NOVEMBER	1.655.150	75.140	4.780		
		DESEMBER	1.750.750	63.780	3.650		
JUMLAH			18.826.684	795.775	50.370	19.672.829	

Gambar 1. Rekapitulasi Jumlah Sampah TPA
Kota Palopo Tahun 2018-2020

Setelah melakukan wawancara dan juga observasi peneliti melihat hal yang perlu dibenahi dalam rangka menerapkan ekonomi hijau berkaitan dengan penanganan limbah hasil kegiatan ekonomi masyarakat yang belum optimal sehingga kegiatan ekonomi yang dilakukan di Kota Palopo saat ini masih belum maksimal dalam menjaga kelestarian lingkungan sehingga peneliti ingin menawarkan strategi penerapan ekonomi hijau yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat

dengan beberapa cara agar Kota Palopo terlepas dari kondisi *middle income trap*, ada 3 hal yang dapat dilakukan sebagai berikut :

a. Penangan limbah dan ekonomi sirkular

Data jumlah limbah yang dihasilkan oleh Kota Palopo dalam 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal ini harus menjadi perhatian oleh pemerintah agar tidak menimbulkan masalah besar dan berkepanjangan kedepannya. Lahan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang dimiliki oleh Kota Palopo yang terbatas serta belum maksimalnya daur ulang limbah menyebabkan perlu adanya langkah tegas oleh pemerintah untuk mengantisipasi masalah ini.

Strategi yang bisa diterapkan yaitu penanganan limbah dan ekonomi sirkular. Limbah yang di hasil kan oleh masyarakat Kota Palopo berjumlah ribuan kilogram kemudian diolah dengan metode sanitari *landfill* yaitu metode pemrosesan sampah dengan membuang dan menumpuk sampah ke suatu lokasi yang cekung, memadatkan sampah tersebut kemudian menutupnya dengan tanah namun untuk penerapan ekonomi hijau pemerintah perlu membuat program agar dapat mengurangi limbah yang menumpuk sekaligus meningkatkan ekonomi seperti cara yang sedang dilakukan di Kota Bogor.

- 1) Pemerintah Kabupaten Bogor merancang program yang dapat mengurangi volume sampah khususnya sampah rumah tangga yang akan di angkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga program tersebut berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungannya Program ini diberi nama Kampung Ramah Lingkungan (KRL).
- 2) Memanfaatkan Kelompok Swadaya Masyarakat untuk Meningkatkan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Menjadi Tempat Daur Ulang Sampah (TPS 3R). Selain itu, Rumah Pengolahan Sampah Citra (RPSC) yang dibangun di Desa Jogjogan, Kecamatan Cisarua, dan akan menangani sampah plastik. Fasilitas pengolahan sampah plastik ini mampu mengolah 500 hingga 700 kg sampah plastik per hari yang dikumpulkan dari bank sampah yang berbeda. Hasil pencacahan sampah dimanfaatkan untuk bahan baku industri di wilayah Bogor, Tangerang, dan Bekasi yang memproduksi barang jadi dari bahan plastik.

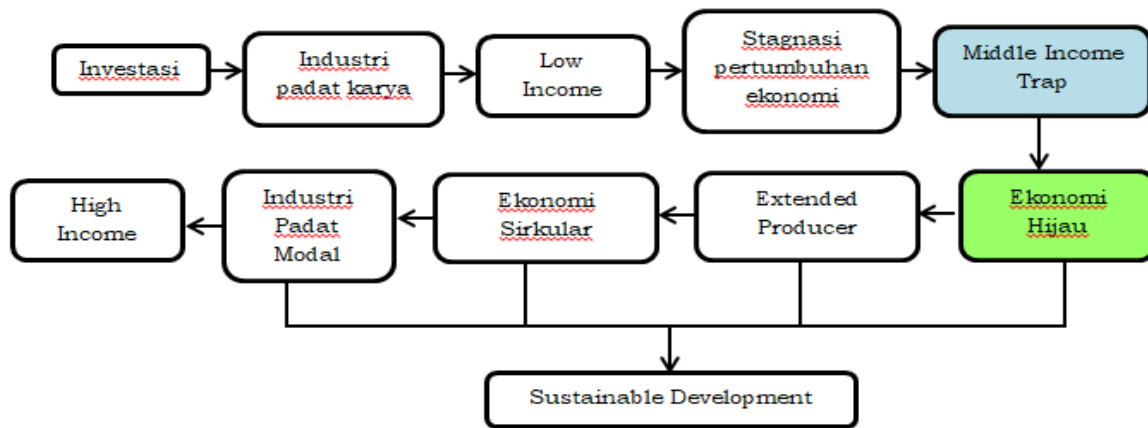
Pengurangan jumlah sampah dan meningkatkan ekonomi masyarakat hingga hari ini pemerintah hanya fokus pada mengumpulkan sampah di TPA tanpa memperhatikan manfaat lain jika mendaur ulang sampah yang ada khususnya sampah plastik padahal dengan pemanfaatan sampah plastik yang tertimbun dalam TPA yang ada dapat membangun sebuah ekosistem ekonomi hijau mengurangi pencemaran lingkungan dengan mengolah ulang sampah yang ada namun hal diatas perlu didukung dengan kebijakan yang spesifik mengatur implementasi ekonomi sirkular, kebijakan itu harus dapat mengontrol dari hulu ke hilir. Untuk mendukung para pelaku yang terlibat dalam pengembangan ekonomi sirkular, pemerintah juga harus berperan sebagai fasilitator dengan mengutamakan penggunaan teknologi ramah lingkungan dan dengan menawarkan berbagai fasilitas.

b. Penerapan Kebijakan *Extended Producer Responsibility* sebagai Peran Produsen yang Melek Ekologi

Ekoliterasi atau kesadaran merupakan perubahan pemikiran masyarakat menuju gaya hidup tanpa sampah perlu didukung oleh peran strategis produsen atau pengusaha. Produsen yang sadar lingkungan dan melek akan sangat penting dalam penanganan dan pembuangan sampah. Secara alami, diperlukan kebijakan dalam situasi ini untuk mengarahkan tindakan produsen. *Extended Producer Responsibility* yang ditingkatkan akan menyediakan sarana untuk mewujudkannya. Sebagai akibat dari kebijakan ini, produsen dituntut untuk bertanggung jawab atas setiap aspek dari siklus produk yang lengkap, mulai dari pemilihan bahan baku hingga produk akhir dan pengemasan hingga dampak sampah yang dihasilkan dari produk mereka.

Extended Producer Responsibility yang diperluas, produsen bertanggung jawab atas segala kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh produk yang mereka buat dan jual. Untuk menghindari menghasilkan sampah, produsen harus bekerja untuk mengatur konsep pengemasan produk dan memastikan bahwa kemasan dari produk yang mereka buat dapat hancur secara alami. Produsen juga bertanggung jawab secara finansial atas pengumpulan, daur ulang, dan pembuangan akhir produk yang dihasilkan jika dijual dalam bentuk barang fisik dengan kemasan yang berpotensi menghasilkan limbah.

Extended Producer Responsibility yang diperluas mensyaratkan bahwa setiap barang yang diproduksi dan kemasannya bebas limbah atau ramah lingkungan. Kebijakan ini sangat cocok diterapkan di Kota Palopo yang membangun konsep Kota *Bussines Traveler* dengan banyaknya pedagang dan industri yang berkembang, para pelaku ekonomi ini perlu sadar mengenai kondisi lingkungan yang mereka tempati seperti industri air minum ASERA yang ada di Kota Palopo yang menjadi industri air minum terbesar di Kota Palopo dengan produk air gelas kemasannya yang cukup banyak menghasilkan limbah plastik. Begitu juga dengan limbah kemasan pedangan minuman dingin dan makanan cepat saji yang kini menjalar di Kota Palopo. Melalui penerapan kebijakan ini akan mampu menekan jumlah limbah yang dihasilkan. Kebijakan *extended producer responsibility* ini telah diterapkan di Thailand, Kota Palopo dapat memberlakukan beberapa peraturan yang relevan misalnya *buy back system* atau *take back, green procurement* atau penyediaan barang ramah lingkungan, *green label*, pajak lingkungan, termasuk menetapkan denda dan intensif.



Gambar 2. Strategi Penerapan Ekonomi Hijau dalam Mengatasi *Middle Income Trap*

Dari gambar 2 dapat dilihat bahwa konsep ekonomi hijau yang bersifat *sustainable development* data dijadikan sebagai solusi dalam peningkatan pendapatan dari *low income* ke *high income* sehingga dapat mengatasi *middle income trap*.

c. Program Pelatihan Ekonomi Hijau

Sumber daya manusia berperan penting dalam menjamin penguasaan teknologi yang ramah lingkungan dan kualitas sumber daya manusia yang mendukung terselenggaranya sumber daya manusia yang ramah lingkungan. *Green skills* harus dilahirkan dengan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia menguasai *green skills* menjadi suatu usaha untuk mendukung pelestarian lingkungan juga hal ini akan menghasilkan *green jobs* atau pekerjaan yang berpihak pada lingkungan. Selain kementerian ketenagakerjaan, kementerian teknis lain yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menawarkan program pelatihan tenaga kerja (Gibbs, 2020)

Program pelatihan mengenai ekonomi hijau harus dibuat untuk masyarakat karena negara-negara dunia telah sadar tentang penjagaan lingkungan dan sekaligus hal tersebut memiliki potensi peningkatan ekonomi sehingga kini pemerintah dan juga swasta sedang melirik untuk berinvestasi ke arah ekonomi hijau. Pemerintah perlu menyiapkan sumber daya manusia yang akan terjun kesana.

Pembahasan

Strategi Mengatasi *Middle Income Trap* melalui Penerapan Ekonomi Hijau

Artikel ini juga telah menemukan strategi penerapan ekonomi hijau yang dapat di terapkan di Kota Palopo sejalan dengan teori yang di ungkapkan Diyar menurutnya ekonomi hijau adalah strategi untuk mencapai kegiatan ekonomi rendah karbon dan mengatasi kelangkaan sumber daya alam dengan meminimalisir kegiatan eksploitasi ekosistem alam yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melonjaknya investasi sekaligus terbukanya lapangan pekerjaan

sekaitan dengan strategi ini. sehingga dari hasil dan obesrvasi yang dilakukan peneliti hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Penanganan Limbah dan Ekonomi Sirkular

Penanganan limbah dengan proses 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) merupakan cara baru dalam manajemen sampah dalam rangka pengaplikasian ide ekonomi hijau sebagai perwujudan pembangunan berkelanjutan (Dikau & Ryan-Collins, 2017) dimana peran masyarakat sangat penting untuk menjalankan program ini dengan upaya pemilahan dan pengolahan sampah hal ini akan sekaligus menumbuhkan kesejahteraan sosial dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan. Penanganan limbah perlu diperhatikan oleh pemerintah Kota Palopo dari data yang didapat dalam 3 tahun terakhir sampah yang dihasilkan oleh kegiatan masyarakat terus meningkat dalam menangani kejadian saat ini pemerintah dapat menerapkan program yang dilakukan oleh pemerintah bogor yaitu dengan optimalisasi fasilitas dengan kembali mengaktifkan kembali TPS yang telah dibangun kemudian penyediaan tempat sampah di pusat-pusat keramaian yang padat oleh kegiatan masyarakat, karena dengan kemudahan menemukan tempat sampah dapat memperkecil kemungkinan masyarakat untuk membuang sampah sembarang tempat dan pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di sekitar TPS juga dapat membantu memaksimalkan fungsi TPS dengan mengumpulkan masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah agar sampah yang di angkut ke TPA dapat berkurang sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat (Dwi et al., n.d.)

Dalam pengolahan sampah oleh masyarakat pemerintah dapat membantu dengan penyediaan teknologi ramah lingkungan untuk mengolah sampah tersebut menjadi produk jadi yang memiliki nilai jual juga dapat memberikan bantuan berupa media untuk promosi produk sehingga dengan pengolahan sampah yang moderen ini dapat membuka lapangan pekerjaan untuk menekan jumlah pengangguran dan juga menekan jumlah sampah yang masuk ke TPA. Pemanfaatan teknologi dalam proses pengolahan sampah dapat menstimulasi para investor untuk melakukan kegiatan investasi hijau di Kota Palopo.

Peraturan yang saat ini ada di Indonesia masih kurang tegas karena peraturan yang ada belum secara khusus berkenaan dengan penerapan ekonomi sirkular. Namun, sejumlah undang-undang sudah ada walaupun secara tidak langsung yang mengatur kegiatan dan kebijakan terkait pengelolaan sampah. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengurangan sampah merupakan salah satu cara untuk mengelola sampah rumah tangga pada tingkat yang paling rendah, yaitu rumah tangga. Undang-undang tersebut juga menguraikan masalah terkait kebijakan dalam berbagai cara, termasuk bagaimana mengurangi timbulan sampah dengan mendaur ulang dan menggunakan kembali sampah untuk tujuan yang sama atau berbeda. Dengan penerapan penanganan limbah yang baik bukan hanya akan memperbaiki lingkungan tapi juga akan memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Strategi ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Wungkus Antasari tentang implimentasi ekonomi hijau yang hasilnya masyarakat merupakan subjek dan objek dalam ekonomi hijau,

manajemen pengolahan sampah merupakan langkah yang perlu didahulukan dengan pengadaan program edukasi ke masyarakat. Keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan ini. Salah satu pengaplikasian ekonomi hijau yaitu dengan program 3R (reduce, reuse, dan recycle) yang sangat membutuhkan peran masyarakat didalamnya (Wungkus Antasari, 2019)

b. Penerapan Kebijakan *Extended Producer Responsibility* sebagai Peran Produsen yang Melek Ekologi

Konsep dengan kebijakan *Extended Producer Responsibility* berarti bahwa produsen bertanggung jawab atas setiap tahap produksi yang dilakukan, dimulai dari awal rantai produksi sampai *post-consumer phase*. Dengan adanya perluasan tanggung jawab tersebut diharapkan dapat mengurangi beban kepada negara untuk memproses limbah yang dihasilkan dengan cara mengurangi jumlah limbah melalui peningkatan daur ulang (Verawati, 2021).

Pemerintah membutuhkan tiga alat untuk mempromosikan tanggung jawab produsen ketika menerapkan kebijakan *Extended Producer Responsibility* yang diperluas ke dalam praktik, sebagai berikut:

- 1) instrumen peraturan, Prosedur pengambilan kembali produk, kriteria konten daur ulang, persyaratan efisiensi penggunaan energi untuk produk dan metode produksi, dan larangan pembuangan produk penghasil limbah semuanya dikenakan pada produsen.
- 2) instrumen ekonomi, Biaya untuk lingkungan diperhitungkan ke dalam harga produk oleh produsen. Produsen dalam situasi ini juga bertanggung jawab untuk pengadaan produk bebas limbah dan pembayaran pajak lingkungan.
- 3) Instrumen informatif berupa daur ulang, komponen hemat energi, peringatan bahaya produk, dan pelabelan yang baik bagi lingkungan (Verawati, 2022)

Strategi ini sejalan dengan Rencana pelestarian lingkungan hidup yang dirancang Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah *United Nations Environment Programme* atau disingkat UNEP, mendeskripsikan ekonomi hijau adalah sebuah konsep ekonomi yang dapat menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Hal dapat menjadi sorotan ada 3 yaitu: *low carbon, socially inclusive, dan resource efficient*. Tujuan ekonomi hijau adalah untuk membalikkan efek merusak dari ekspansi ekonomi terhadap lingkungan dan penipisan sumber daya alam (Priantoko et al., 2021) Dengan tumbuhnya kegiatan ekonomi dengan produk-produk beragam yang menghasilkan sampah dan berpotensi besar untuk merusak lingkungan perlunya ada pengawasan dan kebijakan untuk meregulasi hal ini agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kota Palopo dapat tetap kondisi lingkungan yang baik.

c. Program Pelatihan Ekonomi Hijau

Pelatihan adalah sebuah rangkaian proses untuk mengajarkan pengetahuan dan pengembangan keterampilan kerja agar peserta pelatihan nantinya memiliki kemahiran dan terampil dan tentunya mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik, sesuai standar dan menjadi calon pekerja terqualifikasi. Pelatihan juga adalah salah satu upaya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia (Gibbs, 2020).

Negara Indonesia bahkan dunia sekarang ini sedang melirik ekonomi hijau yang dapat menyelamatkan lingkungan dengan tetap menjaga kondisi ekonomi, kondisi ini juga akan memberikan dampak kepada Kota Palopo seperti akan munculnya perusahaan-perusahaan yang berbasis lingkungan, hal ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Palopo untuk menyiapkan sumber daya manusia ahli yang untuk mengisi pos-pos itu atau sumber daya manusia yang telah dilatih itu akan membantu pemerintah dalam membangun Kota berbasis ekonomi hijau dan hal ini akan membuka lapangan pekerjaan baru yang dapat menyerap para angkatan kerja sehingga pengangguran dapat berkurang dan pendapatan perkapita dapat meningkat dan mengeluarkan Kota Palopo dari *middle income trap*.

Strategi ini di perkuat dengan teori dari (Mena et al., 2019) yang mengatakan bahwa, kinerja lingkungan sangat tergantung pada pelatihan dan pengembangan hijau, rekrutmen dan seleksi hijau, dan kompensasi hijau. Penciptaan lapangan kerja baru dengan investasi skala besar berupa teknologi, bangunan, peralatan dan infrastruktur baru hadir untuk menuju Ekonomi “tahan-iklim (*climate-proofing*)” dan peluang ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin bukan hanya dalam lingkup pelestarian lingkungan tapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja (Erwinsyah, 2021)

Ketentuan tentang pelatihan tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, khususnya pasal 8 ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan tingkat kemampuan dan keahlian tertentu, kompetensi kerja dan produktivitas. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2006, khususnya dalam Pasal 1,4,13, dan 18 memperjelas konsep kompetensi kerja dengan menyatakan bahwa pelatihan kerja mencakup pemberian, peningkatan, dan pengembangan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja. pemerintah, badan hukum, atau perorangan semuanya dapat mengoperasikan lembaga pelatihan kerja. Penguasaan keterampilan kerja merupakan tujuan utama dari pelatihan berbasis kompetensi.

4. PENUTUP

Penerapan ekonomi hijau di Kota Palopo dilihat dari permasalahan yang timbul di Kota Palopo strategi yang dapat dilakukan adalah : (a) Penanganan limbah dan ekonomi sirkular Penanganan limbah diharapkan akan mampu mewujudkan ekonomi hijau dengan proses manajemen sampah yang baik yakni program 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) dapat dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut (b) Penerapan Kebijakan *Extended Producer Responsibility* merupakan kebijakan yang dilakukan dalam menangani dan juga mengontrol pemakaian sumber daya alam yang dilakukan produsen dalam menghasilkan sebuah produk dalam pemaksimalan program ini dibutuhkan tiga instrumen yaitu: instrumen informatif, instrumen peraturan, dan instrumen ekonomi. (c) Program Pelatihan Ekonomi Hijau dengan meningkatnya kesadaran swasta dan juga pemerintah mengenai keberlangsungan sumber daya alam yang kian hari kian menipis sehingga masalah ini menjadi bahan diskusi untuk mencari

solusi dengan menghadirkan konsep ekonomi hijau dan ini mulai diterapkan dengan pembangunan lapangan pekerjaan yang berkaitan dengan ekonomi hijau sehingga pemerintah Kota Palopo perlu mempersiapkan tenaga kerja untuk mendukung hal tersebut dengan harapan pengangguran dapat ditekan sekaligus meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dari *middle income* ke *high income*.

Saran

Adapun saran-saran yang diberikan dengan tujuan untuk kebaikan dan kemajuan Kota Palopo dengan penerapan ekonomi hijau yaitu sebagai berikut: 1.) Diharapkan kepada Pemerintah Kota Palopo agar melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan perlunya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, tidak berfokus hanya pada pencarian keuntungan semata dan melupakan kelestarian lingkungan akibat dari kegiatan ekonomi masyarakat. karena masyarakat perlu sadar bahwa ada hak generasi selanjutnya dalam pemanfaatan alam yang mereka menikmati ini; 2.) Diharapkan kepada masyarakat dan pemerintah untuk berisnergi dalam implementasi strategi mengatasi *middle income trap* dengan kebijakan ekonomi hijau beberapa diantaranya yaitu pengelolaan limbah dan ekonomi sirkuler dan strategi kebijakan *Extended Producer Responsibility* (EPR); 3.) Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan analisis yang lebih komprehensif dengan menggunakan metode kuantitatif atau *mix methode* agar hasil penelitian lebih universal dan komprehensif serta dapat melahirkan strategi yang lebih baik lagi.

5. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Erwinsyah, O.: (2021). PELUANG EKONOMI HIJAU DAN KETERAMPILAN HIJAU MENUJU NETRAL KARBON INDONESIA TAHUN 2060. In *Erwinsyah / Journal of Applied Business and Economic (JABE)* (Vol. 8, Issue 2).
- Gibbs, D. (2020). Green economy. *Essential Concepts of Global Environmental Governance*, December, 116–117. <https://doi.org/10.4324/9780367816681-49>
- Mena, T. D., Tyas, W. P., & Budiati, R. E. (2019). Kajian Dampak Lingkungan Industri Terhadap Kualitas Hidup Warga Sekitar. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7, 156–171.
- Setiawan, S. (2017). International Journal of Economics and Financial Issues Middle Income Trap and Infrastructure issues In Indonesia: A Strategic Perspective. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 42–48. <http://www.econjournals.com>
- Verawati, P. (2021). KRITIK EKOLOGI MENDALAM TERHADAP REGULASI PERSAMPAHAN DI INDONESIA. *Jurnal Meta-Yuridis*, 4(2). <http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/>
- Verawati, P. (2022). *KEBIJAKAN EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY DALAM PENANGANAN MASALAH SAMPAH DI INDONESIA MENUJU MASYARAKAT ZERO WASTE*. 9(1). <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i1>
- Wungkus Antasari, D. (2019). IMPLEMENTASI GREEN ECONOMY TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KOTA KEDIRI. In *Jurnal Ekonomi Pembangunan* (Vol. 5, Issue 2).

Penelitian :

Muhammad, P., Bakri, R., Hanik, D. E., Muamarah, S., Swasito, A. P.,

- Keuangan, P., & Stan, N. (2022). *USAHA PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI INDONESIA DI MASA PANDEMI*.
- Priantoko, A., Anbia, E. F., Margaretha, G., Wulan, R., Panggabean, N., Keuangan, P., & Stan, N. (2021). *TINJAUAN PENERAPAN EKONOMI HIJAU DALAM PARIWISATA DI PROVINSI BALI REVIEW OF THE APPLICATION OF GREEN ECONOMY IN TOURISM IN BALI PROVINCE*. 2(1).
- Susanti, D. D., & Wicaksono, A. M. (n.d.). *MEMBANGUN EKONOMI HIJAU DENGAN BASIS PERTANIAN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2018 BUILDING A GREEN ECONOMIC BASED AGRICULTURAL SECTOR IN CENTRAL JAVA 2013-2018*.

Dokumen & Sumber Lainnya :

- Dikau, S., & Ryan-Collins, J. (2017). Green Central Banking in emerging market and developing country economies. *New Economics Foundation*, 1–50. <https://neweconomics.org/uploads/files/Green-Central-Banking.pdf>
- Dwi, S. A., Implementasi Ekonomi Sirkular dalam Mengelola Sampah Plastik di Kabupaten Bogor, P., & Dwi Sartono, A. (n.d.). *How to cite*.
- Erani, A., Arif, Y. A. P., Dwi, S., Santosa, A., Priyo, E., Saparini, P. H., Faisal, M., Bazwir, R., & Rizky, Y. (n.d.). *Kebijakan Ekonomi dan Sektor Strategis Nasional*.
- Lumbangaol, H. E., & Pasaribu, D. E. (n.d.). *Hotmaria Elecktawati Lumbangaol dan Ernawati Pasaribu, Eksistensi dan Determinan Middle Income Trap di Indonesia | 83 EKSISTENSI DAN DETERMINAN MIDDLE INCOME TRAP DI INDONESIA (Existence and Determinants of Middle Income Trap in Indonesia)*.
- Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2021. (n.d.).